



Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

La Ode Asmar^{1*}, Nining Asniar Ridzal²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No.36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara

ABSTRACT

This research aims to determine the Financial Performance of the Regional Government of South Buton Regency in terms of Financial Ratios including the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Regional Financial Activity Ratio, and Growth Ratio. The data used in this research is the South Buton Regency Regional Government Budget Realization Report for 2018-2022. In this research, the method used is quantitative descriptive analysis method. Data collection methods were carried out by interviews and documentation. Based on the research results, the following conclusions were obtained: (1) The Regional Financial Independence Ratio is still very low in the instructive relationship pattern because the average is 3.91%, (2) The Effectiveness Ratio shows that the Regional Financial Performance of the South Buton Regency Regional Government is categorized as very effective because the average is 172.15%, (3) The financial activity ratio of the Regional Government of South Buton Regency shows that the majority of funds owned by the Government of South Buton Regency still prioritize operational spending with an average of 67.95% compared to average capital expenditure is 30.09%, and (4) the Growth Ratio shows that the Financial Performance of the South Buton Regency Regional Government is always fluctuating and categorized as less than good.

Type of Paper: Empirical

Keywords: *Financial performance; Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Activity Ratio, Growth Ratio*

1. Pengantar

Kabupaten Buton Selatan merupakan daerah yang terbentuk pada tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang pembentukan daerah kabupaten Buton Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton Selatan terdiri dari tujuh kecamatan diantaranya kecamatan batauga, kecamatan sampolawa, kecamatan batuatas, kecamatan kadatua, kecamatan lapandewa, kecamatan siompu, dan kecamatan siompu barat. Sebagai daerah yang wilayah administrasinya cukup luas pemerintah daerah dituntut untuk dapat

^{1*}Kontak Penulis:

Email: laodeasmar2003@gmail.com¹

Afiliasi: ^{1,2}Universitas Muhammadiyah Buton

menjalankan roda pemerintah dengan prinsip pancasila. Menurut Notonegoro mengemukakan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup setiap bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan sebagai bentuk pertahanan Bangsa dan Negara Indonesia(Sari & Najicha, 2022).

Peran aktif pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelolah daerah secara mandiri merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar dapat membangun daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan wewenang tersebut untuk mengelolah dengan baik semua potensi yang dimiliki oleh daerah.

Sebagai daerah otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, pemerintah daerah kabupaten Buton Selatan bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan aktifitas keuangan kepada stekholder. Pertanggungjawaban atas aktifitas keuangan atau pengelolaan keuangan dalam pemerintah daerah umumnya berupa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut(Lillrank dalam Rizki Afri Mulia, 2018). Salah satu laporan keuangan yang dapat mengukur kinerja organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran(Fera Maulina, 2019). Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

Dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. Umumnya Anggran Pendapatan Belanja Daerah dijalankan dalam kurun waktu satu tahun yang didalamnya terdapat komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah buton selatan menyusun laporan realisasi anggaran untuk mengukur antara target dan realisasi yang sebelumnya telah proyeksi dalam Anggran Pendapatan Belanja Daerah sebagai bentuk pengukuran kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik efektif, dan efisien. Dalam mengukur dan menilai kinerja keuangan daerah, umumnya digunakan analisis rasio keuangan diantaranya Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Aktivitas(Halim dalam Nurdin et al., 2023).

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan menghadapi sejumlah tantangan keuangan daerah, antara lain: (a) Besaran bantuan pemerintah pusat/provinsi, baik dari sisi anggaran rutin, khusus subsidi untuk daerah otonom, maupun dari sisi anggaran pemerintah daerah, mencerminkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. (b) Relatif kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah mencerminkan keterbatasan kemampuan daerah untuk melipatgandakan potensi sumber pendapatan asli daerah. (c) Rendahnya belanja modal dan inefisiensi anggaran operasional pemerintah daerah (Nurdin et al., 2023).

Tabel 1 di bawah menunjukkan kondisi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020. Dimana kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Selatan masih sangat didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer rata-rata sekitar 93%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Salatan jika dilihat berdasarkan kontribusi pendapatan asli daerahnya rata-rata sekitar 3% dari jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Salatan. Sehingga kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat diharapkan untuk dijadikan tumpuan dalam mencukupi kebutuhan dana untuk pengeluaran daerah.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2018-2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
A PENDAPATAN	576.632.196.175	617.835.509.437	617.828.222.322
1 Pendapatan Asli Daerah	25.862.320.999	14.985.034.947	19.877.732.842
2 Pendapatan Transfer	543.298.875.176	564.300.992.490	571.471.059.480
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.470.000.000	38.549.482.000	26.479.430.000
B BELANJA	543.977.113.130	504.196.612.316	518.610.334.688
1 Belanja Operasi	397.411.853.176	346.718.264.511	337.825.360.258
2 Belanja Modal	146.547.085.954	157.308.748.819	157.354.216.167
3 Belanja Tak Terduga	18.174.000	169.598.986	23.430.758.263

Sumber: LRA Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2020

Disisi lain, kalau dilihat dari aspek belanja, dalam hal ini belanja operasi di tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rata-rata memiliki porsi pengeluaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja modal. Dimana alokasi untuk belanja operasi rata-rata sekitar 69% dari belanja daerah, sedangkan alokasi untuk belanja modal rata-rata sekitar 29% dari belanja daerah Kabupaten Buton Selatan. Menurut Halim (2012), Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentasi belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Nurdin et al., 2023). Sehingga kalau dilihat dari aspek Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan masih sangat rendah, hal tersebut karena tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Buton Selatan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat.

2. Literature Review

2.1 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Rondonuwu dalam Ropa, 2016).

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim dalam Mutiha, 2016).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil perolehan dari kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan berkaitan dalam penggunaan anggaran daerah dengan menilai efisiensi pada pelayanan kepada masyarakat sebagai alat ukur kemampuan daerah (Mahmudi dalam Nurdin et al., 2023).

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Kartoprawiro & Susanto, 2018).

2.3 Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah suatu alat analisis yang menghubungkan dan membandingkan suatu jumlah tertentu dengan jumlah lainnya, serta mengidentifikasi hubungan antara keduanya, misalnya dengan menghubungkan jumlah pada suatu pos tertentu dengan jumlah

pos lainnya dalam rencana, akan memperoleh perbandingan (rasio) yang dapat menggambarkan baik atau buruknya posisi keuangan (Mahmudi dalam Purnomo, 2018). Adapun jenis-jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah melakukan pembiayaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan dengan mengidentifikasi besarnya kontribusi PAD terhadap sumber dana dari eksternal pemerintah daerah (Rante et al dalam Putri & Munandar, 2021). Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian sebaliknya (Halim dan Kusufi dalam Nurdin et al., 2023). Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer dan Pinjaman}} \times 100 \%$$

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25%	Intruktif
Rendah	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber: Halim dalam Nurdin et al 2023.

2.3.2 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (Harahap, 2020). Rasio efektivitas menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan, lalu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim dalam Nurdin et al., 2023). Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Presentase Efektivitas
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90-99%
Kurang Efektif	75-89%
Tidak Efektif	Kurang dari 75%

Sumber: Mahmudi dalam Nurdin et al 2023

2.3.3 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas/rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase

belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim dalam Zuhri & Soleh, 2016). Ada dua perhitungan didalam rasio aktivitas, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Belanja operasi merupakan perbandingan antara total realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah (Mahmudi dalam Nurdin et al., 2023). Belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi dalam Nurdin et al., 2023). Belanja Modal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.3.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja positif atau negatif (Mahmudi dalam Fathah, 2017). Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Operasi/Belanja Modal yang dihitung tahun ke-n

P_0 = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Operasi/Belanja Modal yang dihitung tahun ke-0 (Tahun Sebelum n)

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Sampel dalam penelitian ini adalah data/laporan reaslisasi anggran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Adapaun analisis data yang digunakan terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio efektifitas, rasio aktivitas, Rasio pertumbuhan.

4. Hasil

4.1 Rasio Kemandirian

Tabel 5 berikut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Buton Selatan untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan untuk pendapatan transfer berasal dari dana bagi hasil pajak pemerintah pusat, dana bagi hasil bukan pajak (SDA), dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana desa, dana penyesuaian, pendapatan bagi hasil pajak pemerintah provinsi, pendapatan transfer antar daerah. Berdasarkan uraian tersebut sehingga perlu

disusun rasio kemandirian.

Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	25.863.320.999	14.985.034.947	19.877.732.842	21.571.251.539	30.355.304.970
Pajak Daerah	1.625.516.568	1.593.735.697	1.981.321.016	2.293.960.037	3.016.297.686
Retribusi Daerah	1.129.344.420	1.621.165.930	2.615.848.863	3.584.189.665	3.116.361.010
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	619.947.407	781.281.736	2.016.724.908	2.488.260.411	2.542.862.222
Lain-Lain PAD yang Sah	22.488.512.604	10.988.851.584	13.263.838.054	13.204.841.426	21.679.784.052
Pendapatan Trasfer	543.298.875.176	564.300.992.490	571.471.059.480	601.555.287.809	596.323.580.151
Dana Bagi Hasil Pajak *	6.785.188.411	6.680.424.171	4.563.258.036	10.166.897.001	7.955.996.412
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) *	9.304.945.594	18.901.171.386	18.590.279.427	45.591.421.132	86.653.008.014
DAU *	343.792.717.000	368.867.801.000	336.333.934.000	334.882.640.000	335.221.306.718
DAK *	125.031.358.075	99.255.763.256	112.601.776.779	103.968.235.402	98.177.969.748
Dana Insentive Daerah *	0	0	26.314.618.000	28.612.758.000	3.140.497.000
Dana Desa *	0	0	0	0	50.027.957.000
Dana Penyesuaian *	50.847.283.000	59.786.450.000	61.159.126.000	62.349.953.000	0
Pendapatan Bagi Hasil Pajak ^	7.537.323.096	10.809.382.677	11.908.067.238	0	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah ^	0	0	0	15.983.383.274	15.146.845.259

Catatan:

Tanda (*) Merupakan Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat

Tanda (^) Merupakan Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Provinsi

Sumber: LRA Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian sebaliknya (Halim dan Kusufi dalam Nurdin et al., 2023). Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 25.863.320.999}}{\text{Rp. 543.298.875.176}} \times 100\% = 4,76\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 14.985.034.947}}{\text{Rp. 564.300.992.490}} \times 100\% = 2,66\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 19.877.732.842}}{\text{Rp. 571.471.059.480}} \times 100\% = 3,48\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. 21.571.251.539}}{\text{Rp. 601.555.287.809}} \times 100\% = 3,59\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 30.355.304.970}}{\text{Rp. 596.323.580.151}} \times 100\% = 5,09\%$$

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan
2018	543.298.875.176	25.863.320.999	4,76%	Intruktif
2019	564.300.992.490	14.985.034.947	2,66%	Intruktif
2020	571.471.059.480	19.877.732.842	3,48%	Intruktif
2021	601.555.287.809	21.571.251.539	3,59%	Intruktif
2022	596.323.580.151	30.355.304.970	5,09%	Intruktif
Rata-rata	575.389.959.021	22.530.529.059	3,91%	Intruktif

Sumber: Data Diolah 2024

Tabel 6 hasil menunjukkan bahwa presentase rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2018 yaitu 4,76 %, selanjutnya pada tahun 2019 yaitu 2,66%, kemudian pada tahun 2020 yaitu 3,48%, dan untuk tahun 2021 yaitu 3,59%, terakhir pada tahun 2022 yaitu 5,09%. Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton selatan menunjukkan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan 2022 tingkat presentase rasio kemandirian keuangan daerah yang terkecil terdapat pada tahun 2019 yaitu 2,66%, sedangkan yang terbesar terdapat pada tahun 2022 yaitu 5,09%. Dan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2018-2022 berada pada tingkat persentase 3,91% dengan pola hubungan intruktif dan kemampuan keuangan rendah sekali.

4.2 Rasio Efektivitas

Berikut ini target dan realisasi Pendapatan Asli daerah Kabupaten Buton Selatan dan rasio efektivitas.

Tabel 7. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022

URAIAN	TAHUN									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Asli Daerah	5.749.372.807	25.863.320.999	16.480.521.109	14.985.034.947	19.126.644.556	19.877.732.842	18.693.051.625	21.571.251.539	30.163.316.095	30.355.304.970
Pajak Daerah	1.441.000.000	1.625.516.568	1.459.000.000	1.593.735.697	1.820.000.000	1.981.321.016	1.680.000.000	2.293.960.037	2.190.000.000	3.016.297.686
Retribusi Daerah	793.425.400	1.129.344.420	880.544.000	1.621.165.930	3.164.942.157	2.615.848.863	3.897.351.025	3.584.189.665	3.474.239.000	3.116.361.010
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	619.947.407	0	781.281.736	0	2.016.724.908	2.400.000.000	2.488.260.411	2.542.862.222	2.542.862.222
Lain-Lain PAD yang Sah	3.514.947.407	22.488.512.604	14.140.977.109	10.988.851.584	14.141.702.399	13.263.838.054	10.715.700.600	13.204.841.426	21.956.214.873	21.679.784.052

Sumber: LRA Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan, lalu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim dalam Nurdin et al., 2023). Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022, sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 25.863.320.999}}{\text{Rp. 5.749.372.807}} \times 100\% = 449,85\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 14.985.034.947}}{\text{Rp. 16.480.521.109}} \times 100\% = 90,93\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 19.877.732.842}}{\text{Rp. 19.126.644.556}} \times 100\% = 103,93\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. 21.571.251.539}}{\text{Rp. 18.693.051.625}} \times 100\% = 115,40\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Rp. 30.355.304.970}}{\text{Rp. 30.163.316.095}} \times 100\% = 100,64\%$$

Tabel 8 hasil menunjukkan bahwa presentase rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2018 yaitu 449,85%, selanjutnya pada tahun 2019 yaitu 90,93%, kemudian pada tahun 2020 yaitu 103,93%, dan untuk tahun 2021 yaitu 115,40%, terakhir pada tahun 2022 yaitu 100,64%. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 tingkat presentase rasio efektivitas keuangan daerah yang terkecil terdapat pada tahun 2019 yaitu 90,93%, sedangkan yang terbesar terdapat pada tahun 2018 yaitu 449,85%. Dan rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 berada pada tingkat persentase 172,15% dengan dengan kriteria efektivitas sangat efektif.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2018	5.749.372.807	25.863.320.999	449,85%	Sangat Efektif
2019	16.480.521.109	14.985.034.947	90,93%	Cukup Efektif
2020	19.126.644.556	19.877.732.842	103,93%	Sangat Efektif
2021	18.693.051.625	21.571.251.539	115,40%	Sangat Efektif
2022	30.163.316.095	30.355.304.970	100,64%	Sangat Efektif
Rata-rata	18.042.581.238	22.530.529.059	172,15%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2024

4.3 Rasio Aktivitas

Tabel 9. Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Daerah	543.977.113.130	504.196.612.316	518.610.334.688	573.034.795.848	464.504.574.708
Belanja Operasi	397.411.853.176	346.718.264.511	337.825.360.258	346.291.293.932	336.205.478.709
Belanja Pegawai	169.274.548.208	181.354.105.675	189.181.876.205	164.774.513.900	167.627.381.294
Belanja Barang dan Jasa	137.099.558.068	161.852.259.587	145.963.603.253	168.036.246.699	156.601.104.517
Belanja Bunga	0	0	1.352.176.800	3.922.482.828	5.913.500.148
Belanja Hibah	4.292.355.000	3.013.750.000	833.600.000	7.283.050.505	6.032.442.750
Belanja Bantuan Sosial	0	50.000.000	494.104.000	2.275.000.000	31.050.000
Belanja Bantuan Keuangan	86.745.391.900	448.149.250	0	0	0
Belanja Modal	146.547.085.954	157.308.748.819	157.354.216.167	219.978.009.352	109.602.776.187
Belanja Tanah	198.228.200	3.934.805.700	2.132.060.000	634.408.437	118.754.000
Belanja Peralatan dan Mesin	20.200.011.733	31.303.285.478	26.271.353.162	62.304.029.707	21.377.882.499
Belanja Bangunan dan Gedung	16.918.515.601	53.975.488.702	64.301.311.712	116.302.011.658	39.736.488.462
Belanja Barang Irigasi dan Jaringan	96.389.284.381	59.975.488.702	55.101.048.743	38.511.814.450	45.481.576.514
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.841.046.039	8.599.833.611	9.548.442.550	2.225.745.100	2.888.074.712

Sumber: LRA Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022

Tabel 9 menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 sebagian dipergunakan untuk belanja operasi dan belanja modal. Belanja daerah yang dipergunakan untuk belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan. Disisi lain untuk belanja modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja barang irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Dari uraian tersebut sehingga perlu disusun rasio aktivitas.

Rasio aktivitas/rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal (Halim dalam Zuhri & Soleh, 2016). Ada dua perhitungan di dalam rasio aktivitas, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

4.4 Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah (Mahmudi dalam Nurdin et al., 2023). Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan belanja operasi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022, sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 397.411.853.176}}{\text{Rp. 543.977.113.130}} \times 100\% = 73,06\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 346.718.264.511}}{\text{Rp. 504.196.612.316}} \times 100\% = 68,77\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 337.825.360.258}}{\text{Rp. 518.610.334.688}} \times 100\% = 65,14\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. 346.291.293.932}}{\text{Rp. 573.034.795.848}} \times 100\% = 60,43\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Rp. 336.205.478.709}}{\text{Rp. 464.504.574.708}} \times 100\% = 72,38\%$$

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Operasi
2018	397.411.853.176	543.977.113.130	73,06%
2019	346.718.264.511	504.196.612.316	68,77%
2020	337.825.360.258	518.610.334.688	65,14%
2021	346.291.293.932	573.034.795.848	60,43%
2022	336.205.478.709	464.504.574.708	72,38%
Rata-rata	352.890.450.117	520.864.686.138	67,95%

Sumber: Data Diolah 2024

Tabel 10 hasil menunjukkan bahwa presentase rasio aktivitas (belanja operasi) keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2018 yaitu 73,06%, selanjutnya pada tahun 2019 yaitu 68,77%, kemudian pada tahun 2020 yaitu 65,14%, dan untuk tahun 2021 yaitu 60,43%, terakhir pada tahun 2022 yaitu 72,38%. Berdasarkan perhitungan rasio belanja operasi Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 tingkat presentase rasio belanja operasi yang terkecil terdapat pada tahun 2021 yaitu 60,43%, sedangkan yang terbesar terdapat pada tahun 2018 yaitu 73,06%. Dan rata-rata rasio belanja operasi Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 berada pada tingkat persentase 67,95%.

4.5 Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi dalam Nurdin et al., 2023). Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan belanja modal Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022, sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 146.547.085.954}}{\text{Rp. 543.977.113.130}} \times 100\% = 26,94\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 157.308.748.819}}{\text{Rp. 504.196.612.316}} \times 100\% = 31,20\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 157.354.216.167}}{\text{Rp. 518.610.334.688}} \times 100\% = 30,34\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. 219.978.009.352}}{\text{Rp. 573.034.795.848}} \times 100\% = 38,39\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Rp. 109.602.776.187}}{\text{Rp. 464.504.574.708}} \times 100\% = 23,60\%$$

Tabel 11. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan

Tahun	Belanja Modal (2) (Rp)	Total Belanja (3) (Rp)	Rasio Belanja Modal
2018	146.547.085.954	543.977.113.130	26,94%
2019	157.308.748.819	504.196.612.316	31,20%
2020	157.354.216.167	518.610.334.688	30,34%
2021	219.978.009.352	573.034.795.848	38,39%
2022	109.602.776.187	464.504.574.708	23,60%
Rata-rata	158.158.167.296	520.864.686.138	30,09%

Sumber: Data Diolah 2024

Tabel 11 hasil menunjukkan bahwa presentase rasio aktivitas (belanja modal) keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2018 yaitu 26,94%, selanjutnya pada tahun 2019 yaitu 31,20%, kemudian pada tahun 2020 yaitu 30,34%, dan untuk tahun 2021 yaitu 38,39%, terakhir pada tahun 2022 yaitu 23,60%. Berdasarkan perhitungan rasio belanja operasi Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 tingkat presentase rasio belanja operasi yang terkecil terdapat pada tahun 2022 yaitu 23,60%, sedangkan yang terbesar terdapat pada tahun 2021 yaitu 38,39%. Dan rata-rata rasio belanja operasi Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 berada pada tingkat persentase 30,09%.

4.6 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja positif atau negatif (Mahmudi dalam Fathah, 2017). Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Tahun 2018

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Rp. 25.863.320.999} - \text{Rp. 8.494.630.034}}{\text{Rp. 8.494.630.034}} \times 100\% = 204,47\%$$

$$\text{Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Rp.576.632.196.175} - \text{Rp. 524.784.609.615}}{\text{Rp. 524.784.609.615}} \times 100\% = 9,88\%$$

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Rp. 397.411.853.176} - \text{Rp.269.846.203.394}}{\text{Rp. 269.846.203.394}} \times 100\% = 47,27\%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Rp. 146.547.085.954} - \text{Rp. 183.453.245.013}}{\text{Rp. 183.453.245.013}} \times 100\% = -20,12\%$$

2. Pertumbuhan Tahun 2019

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Rp.14.985.034.947} - \text{Rp.25.863.320.999}}{\text{Rp. 25.863.320.999}} \times 100\% = -42,06\%$$

$$\text{Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Rp.617.835.509.437} - \text{Rp. 576.632.196.175}}{\text{Rp. 576.632.196.175}} \times 100\% = 7,15\%$$

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Rp. 346.718.264.511} - \text{Rp. 397.411.853.176}}{\text{Rp. 397.411.853.176}} \times 100\% = -12,76\%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Rp. 157.308.748.819} - \text{Rp. 146.547.085.954}}{\text{Rp. 146.547.085.954}} \times 100\% = -20,12\%$$

3. Pertumbuhan Tahun 2020

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Rp. 19.877.732.842} - \text{Rp.14.985.034.947}}{\text{Rp. 14.985.034.947}} \times 100\% = 32,65\%$$

$$\text{Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Rp. 617.828.222.321} - \text{Rp. 617.835.509.437}}{\text{Rp. 617.835.509.437}} \times 100\% = -0,001\%$$

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Rp. 337.825.360.258} - \text{Rp. 346.718.264.511}}{\text{Rp. 346.718.264.511}} \times 100\% = -2,56\%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Rp. 157.354.216.167} - \text{Rp. 157.308.748.819}}{\text{Rp. 157.308.748.819}} \times 100\% = 0,03\%$$

4. Pertumbuhan Tahun 2021

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Rp. 21.571.251.539} - \text{Rp.19.877.732.842}}{\text{Rp. 19.877.732.842}} \times 100\% = 8,52\%$$

$$\text{Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Rp. 641.738.760.348} - \text{Rp. 617.828.222.321}}{\text{Rp. 617.828.222.321}} \times 100\% = -3,87\%$$

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Rp. } 346.291.293.932 - \text{Rp. } 337.825.360.258}{\text{Rp. } 337.825.360.258} \times 100\% = 2,51\%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Rp. } 219.978.009.352 - \text{Rp. } 157.354.216.167}{\text{Rp. } 157.354.216.167} \times 100\% = 39,80\%$$

5. Pertumbuhan Tahun 2022

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Rp. } 30.355.304.970 - \text{Rp. } 21.571.251.539}{\text{Rp. } 21.571.251.539} \times 100\% = 40,72\%$$

$$\text{Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Rp. } 626.678.885.121 - \text{Rp. } 641.738.760.348}{\text{Rp. } 641.738.760.348} \times 100\% = -2,35\%$$

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Rp. } 336.205.478.709 - \text{Rp. } 346.291.293.932}{\text{Rp. } 346.291.293.932} \times 100\% = -2,91\%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Rp. } 109.602.776.187 - \text{Rp. } 219.978.009.352}{\text{Rp. } 219.978.009.352} \times 100\% = -50,18\%$$

Tabel 12 hasil menunjukkan bahwa presentase rasio pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 semua rasio mengalami fluktuatif. Presentase rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun 2018 yaitu 204,47%, selanjutnya pada tahun 2019 yaitu -40,06%, kemudian pada tahun 2020 yaitu 32,65%, dan untuk tahun 2021 yaitu 8,52%, terakhir pada tahun 2022 yaitu 40,72%. Dilihat dari sisi pendapatan daerah presentase rasio pertumbuhan pada tahun 2018 yaitu 9,88%, selanjutnya pada tahun 2019 yaitu 7,15%, kemudian pada tahun 2020 yaitu -0,001%, dan untuk tahun 2021 yaitu 3,87%, terakhir pada tahun 2022 yaitu -2,35%.

Tabel 12. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan

Keterangan	Tahun					
	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
PAD	8.494.630.034	25.863.320.999	14.985.034.947	19.877.732.842	21.571.251.539	30.355.304.970
Pertumbuhan PAD		204,47%	-42,06%	32,65%	8,52%	40,72%
Pendapatan Daerah	524.784.609.615	576.632.196.175	617.835.509.437	617.828.222.321	641.738.760.348	626.678.885.121
Pertumbuhan Pendapatan Daerah		9,88%	7,15%	-0,001%	3,87%	-2,35%
Belanja Operasi	269.846.203.394	397.411.853.176	346.718.264.511	337.825.360.258	346.291.293.932	336.205.478.709
Pertumbuhan Belanja Operasi		47,27%	-12,76%	-2,56%	2,51%	-2,91%
Belanja Modal	183.453.245.013	146.547.085.954	157.308.748.819	157.354.216.167	219.978.009.352	109.602.776.187
Pertumbuhan Belanja Modal		-20,12%	7,34%	0,03%	39,80%	-50,18%

Sumber: Data Diolah 2024

Selain rasio pertumbuhan perndapatan asli daerah dan pendapatan daerah, tabel 12 juga menunjukkan rasio pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal. Berdasarkan tabel tersebut rasio pertumbuhan belanja operasi pada tahun 2018 yaitu 47,27%, selanjutnya pada tahun 2019 yaitu -12,76%, kemudian pada tahun 2020 yaitu -2,56%, dan untuk tahun 2021 yaitu 2,51%, terakhir pada tahun 2022 yaitu -2,91%. Disisi lain, rasio pertumbuhan belanja modal pada tahun 2018 yaitu -20,12%, selanjutnya pada tahun 2019 yaitu 7,34%, kemudian pada tahun 2020 yaitu 0,03%, dan untuk tahun 2021 yaitu 39,80%, terakhir pada tahun 2022 yaitu -50,18%.

5. Diskusi

5.1 Rasio Kemandirian

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2018 sebesar 4,76% dan mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 2,66% pada tahun 2019, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 3,48%, tahun 2021 sebesar 3,59, dan tahun 2022 sebesar 5,09%. Presentase rasio kemandirian keuangan daerah tiap tahun senantiasa berada dalam pola hubungan intruktif dengan kemampuan keuangan rendah sekali. Kemudian rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan untuk lima tahun terakhir yakni dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 3,91% dengan pola hubungan intruktif dan kemampuan keuangan rendah sekali. Adapun penyebab rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan karena:

"Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah baik dari sisi regulasi maupun sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan, sehingga banyak potensi penerimaan daerah yang tidak dapat digali atau dimanfaatkan, dengan ini maka berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah kurang maksimal" (10 Juni 2024, Pukul 11:00 WITA).

Bapak La Ode Safrim, SE. selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kas BPKAD Kabupaten Buton Selatan mengungkapkan bahwa penyebab rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan karena belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah baik dari sisi regulasi maupun sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan, sehingga banyak potensi penerimaan daerah yang tidak dapat digali atau dimanfaatkan, dengan ini maka berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah kurang maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh daerah, dengan kata lain pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan masih bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hanik (2014) yang melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dijelaskan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Semarang jika dilihat dari rasio kemandirian dapat dikategorikan rendah sekali. Dalam penelitian ini juga terjadi di Kabupaten Buton Selatan, dimana kinerja keuangan daerah dikategorikan dengan pola hubungan intruktif dengan kemampuan keuangan rendah sekali.

5.2 Rasio Efektivitas

Berdasarkan Rasio Efektivitas keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan dari tahun ketahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 senantiasa fluktuatif. Dari perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2018 sebesar 449,85% atau realisasi PAD Rp.25.863.320.999 dari targer/anggaran PAD Rp.5.749.372.807, selanjutnya pada tahun 2019

berbanding tebalik dengan keadaan tahun 2018, dimana untuk tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 90,93% atau realisasi PAD Rp.14.985.034.947 dari target/anggaran PAD Rp. 16.480.521.109, pada tahun tersebut pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan belum mampu memaksimalkan realisasi PAD dari target/anggaran PAD sehingga dapat dikategorikan dengan kriteria efektivitas cukup efektif. Adapun penyebab rasio efektivitas hanya pada kriteria efektivitas cukup efektif karena:

“Disebabkan oleh adanya perubahan regulasi dalam pelaporan, dimana terjadinya perubahan pengakuan pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang pada saat penetapan APBD dianggarkan pada akun pendapatan asli daerah dalam hal ini akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan perubahan regulasi maka diakui sebagai lain-lain pendapatan yang sah sehingga berdampak tidak tercapainya target pada pendapatan asli daerah namun berbanding terbalik dengan lain-lain pendapatan yang sah yang realisasinya melebihi target/anggaran”(10 Juni 2024, Pukul 11:00 WITA).

Bapak La Ode Safrim, SE. selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kas BPKAD Kabupaten Buton Selatan mengungkapkan bahwa penyebab rasio efektivitas berada pada kriteria efektivitas cukup efektif karena adanya perubahan regulasi dalam pelaporan, dimana terjadinya perubahan pengakuan pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang pada saat penetapan APBD dianggarkan pada akun pendapatan asli daerah dalam hal ini akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan perubahan regulasi maka diakui sebagai lain-lain pendapatan yang sah sehingga berdampak tidak tercapainya target pada pendapatan asli daerah namun berbanding terbalik dengan lain-lain pendapatan yang sah yang realisasinya melebihi target/anggaran.

Kemudian pada tahun 2020 sebesar 103,93% atau realisasi PAD Rp.19.877.732.842 dari target/anggaran PAD Rp. 19.126.644.556, dan pada tahun 2021 sebesar 115,40% atau realisasi PAD Rp. 21.571.251.539 dari target/anggaran PAD Rp.18.693.051.625, dan terakhir tahun 2022 sebesar 100,64% atau realisasi PAD Rp.30.355.304.970 dari target/anggaran PAD Rp.30.163.316.095. Presentase rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan untuk tahun 2018 dan 2020 sampai dengan 2021 berada dalam kriteria efektivitas sangat efektif dan untuk tahun 2019 berada dalam kriteria efektivitas cukup efektif. Kemudian rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan untuk lima tahun terakhir yakni dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 172,15% dengan kriteria efektivitas sangat efektif.

Diukur dengan parameter rasio efektivitas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah sudah sangat efektif dalam lima tahun terakhir yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertahankan kinerjanya atau dapat meningkatkannya sehingga bisa lebih tinggi lagi untuk tahun selanjutnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2023) yang melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2016 -2020 dijelaskan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan jika dilihat dari rasio efektivitas dapat dikategorikan sangat efektif. Dalam penelitian ini juga terjadi di Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2022, dimana kinerja keuangan daerah dikategorikan sangat efektif.

5.3 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan dari tahun ketahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 senantiasa fluktuatif. Dari perhitungan rasio aktivitas keuangan daerah dapat dilihat bahwa rasio belanja operasi pada tahun 2018 sebesar 73,06% atau realisasi belanja operasi Rp. 397.411.853.176 dari total belanja daerah Rp.543.977.113.130, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 68,77% atau realisasi belanja operasi Rp.346.718.264.511 dari total belanja daerah Rp.504.196.612.316, kemudian pada tahun 2020 sebesar 65,14% atau realisasi belanja operasi Rp.337.825.360.258 dari total belanja operasi Rp.518.610.334.688, dan pada tahun 2021 sebesar 60,43% atau realisasi belanja operasi Rp.346.291.293.932 dari total belanja daerah Rp.573.034.795.848, dan

terakhir pada tahun 2022 sebesar 72,38% atau realisasi belanja operasi Rp.336.205.478.709 dari total belanja daerah Rp.464.504.574.708.

Disisi lain terlihat bahwa rasio belanja modal pada tahun 2018 sebesar 26,94% atau realisasi belanja modal Rp.146.547.085.954 dari total belanja daerah Rp.543.977.113.130, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 31,20% atau realisasi belanja modal Rp.157.308.748.819 dari total belanja daerah Rp.504.196.612.316, kemudian pada tahun 2020 sebesar 30,34% atau realisasi belanja modal Rp.157.354.216.167 dari total belanja operasi Rp.518.610.334.688, dan pada tahun 2021 sebesar 38,39% atau realisasi belanja operasi Rp.219.978.009.352 dari total belanja daerah Rp.573.034.795.848, dan terakhir pada tahun 2022 sebesar 23,60% atau realisasi belanja operasi Rp.109.602.776.187 dari total belanja daerah Rp.464.504.574.708.

Menurut uraian diatas bahwa rata-rata rasio belanja operasi sebesar 67,95% dan belanja modal sebesar 30,09%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan lebih memprioritaskan belanja operasi dibanding dengan belanja modal. Penyebab pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal karena:

“karena belanja modal merupakan alokasi mandatory, dimana presentasi alokasi belanja sudahnya sudah ditetapkan dan tidak melebihi besaran belanja operasi”
(10 Juni 2024, pukul 11:00 WITA).

Bapak La Ode Safrim, SE. selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kas BPKAD Kabupaten Buton Selatan mengungkapkan bahwa penyebab pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal karena belanja modal merupakan alokasi mandatory, dimana presentasi alokasi belanja sudahnya sudah ditetapkan dan tidak melebihi besaran belanja operasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hanik (2014) yang melakukan penelitan di pemerintah daerah Kabupaten Semarang dijelaskan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Semarang jika dilihat dari rasio aktifitas terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Semarang lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal. Dalam penlitian ini juga terjadi di Kabupaten Buton Salatan, dimana kinerja keuangan daerahnya lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal.

5.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 semua rasio mengalami fluktuatif. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sebesar 204,47%, kemudian pada tahun 2019 turun drastis sebesar -40,06%, kemudian pada tahun 2020 naik sebesar 32,65%, dan untuk tahun 2021 turun sebesar 8,52%, terakhir pada tahun 2022 naik sebesar 40,72%. Dilihat dari sisi pendapatan daerah presentase rasio pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 9,88%, selanjutnya pada tahun 2019 terjadi penurunan 7,15%, kemudian pada tahun 2020 turun sebesar -0,001%, dan untuk tahun 2021 naik sebesar 3,87%, terakhir pada tahun 2022 turun sebesar -2,35%.

Selain rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah dapat dilihat juga pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal. Jika dilihat dari pertumbuhan belanja operasi pada tahun 2018 yaitu 47,27%, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar -12,76%, kemudian pada tahun 2020 turun sebesar -2,56%, dan untuk tahun 2021 naik sebesar 2,51%, terakhir pada tahun 2022 turun sebesar -2,91%. Disisi lain jika dilihat dari pertumbuhan belanja modal pada tahun 2018 sebesar -20,12%, selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 7,34%, kemudian pada tahun 2020 naik 0,03%, dan untuk tahun 2021 naik 39,80%, terakhir pada tahun 2022 turun -50,18%.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan senantiasa flutuatif, sehingga dapat dikategorikan kurang baik. Adapun penyebab rasio pertumbuhan keuangan Kabupaten Buton Selatan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun karena:

“Kerena (1) pada sisi pendapatan daerah karena pendapatan transfer tiap tahunnya berubah khususnya dana bagi hasil pusat yang disebabkan kurang bayarannya pusat tahun-tahun sebelumnya serta dana desa dan dana insentif, (2) Pada sisi pendapatan asli daerah lebih dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan retribusi akibat beroperasinya RSUD Buton Selatan.(3) Pada sisi belanja daerah khususnya belanja operasi dan belanja modal sudah pasti berubah dengan perubahan pendapatan” (10 Juni 2024, Pukul 11:00 WITA).

Bapak La Ode Safrin, SE selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kas BPKAD Kabupaten Buton Selatan mengungkapkan bahwa penyebab rasio pertumbuhan keuangan Kabupaten Buton Selatan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun karena (1) pada sisi pendapatan daerah karena pendapatan transfer tiap tahunnya berubah khususnya dana bagi hasil pusat yang disebabkan kurang bayarannya pusat tahun-tahun sebelumnya serta dana desa dan dana insentif, (2) Pada sisi pendapatan asli daerah lebih dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan retribusi akibat beroperasinya RSUD Buton Selatan.(3) Pada sisi belanja daerah khususnya belanja operasi dan belanja modal sudah pasti berubah dengan perubahan pendapatan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2019) yang melakukan penelitian di pemerintah daerah Kota Mataram bahwa kinerja keuangan daerah Kota Mataram jika dilihat dari rasio pertumbuhan dapat dikategorikan kurang baik. Dalam penelitian ini juga terjadi di Kabupaten Buton Selatan, dimana kinerja keuangan daerahnya dikategorikan kurang baik.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan adalah: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berada pada pola hubungan intruktif dengan kemampuan keuangan rendah sekali, dimana rata-rata rasio kemandiriannya sebesar 3,91%. Dan dapat diartikan bahwa peranan pemerintah pusat dan provinsi lebih dominan dibandingkan dengan tingkat kemandirian pemerintah daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan jika dilihat dari rasio efektivitas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu dengan kriteria efektivitas sangat efektif, karena setiap tahunnya realisasi pendapatan asli daerah selalu mencapai target yang telah ditetapkan, dimana rata-rata rasio efektivitasnya diatas 100% yaitu 172,15%. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan jika dilihat dari rasio aktivitas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten buton selatan mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk belanja operasi yaitu rata-rata sebesar 67,95% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 30,09%. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan jika dilihat dari rasio pertumbuhan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah, pendapatan daerah, belanja operasi dan belanja modal senantiasa fluktuatif dan dapat dikategorikan kurang baik.

Referensi

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15–31.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48.
<http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/109/97>
- Fera Maulina, R. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal OBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 11–22.
<https://jurnal.polteq.ac.id/index.php/obis/article/download/30/12>
- Hanik, F. U., & Karyanti, T. D. (2014). *ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH*. 22(2), 143–156.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14.
<https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010–2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101>
- Nurdin, E., Wawo, A. B., Ramadhan, S., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Universitas, B., & Oleo, H. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah). *Online) Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 08(01), 2503–1635. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2016-2020 JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 5(3), 2296–2313.
- Rizki Afri Mulia. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal El-Riyasah*, 9(1), 1–15.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 738–747.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 7(1), 53–58.
<https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92.
<https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 187–195.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (2013).